

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

A. Buku

- Anand, Ghansham, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad, 2017, *Sejarah Daulah Utsmaniyah: Faktor-faktor Kebangkitan dan Sebab-sebab Keruntuhannya*, Ummul Qura, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budhiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Bachrudin, 2019, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Brown, Ray Andrewa, 1955, *The Law of Personal Property*, Callaghan & Company, Chicago.
- Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul, 2021, *Dasar-dasar Teori Organisasi*, IRDEV, Riau.
- Garner, Bryan A., 2019, *Black's Law Dictionary 11th Edition*, Thomson Reuters, St. Paul.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- HS, Salim, 2022, *Pengantar Kode Etik Notaris Indonesia, Amerika Serikat, Italia dan Kanada*, Reka Cipta, Bandung.
- , 2019, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, Oksep Adhayanto, dan Pery Rehendra Sucipta, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Laboratorium Komunikasi dan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang.
- Isharyanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta.

- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Law, Jonathan, 2015, *A Dictionary of Law Eight Edition*, Oxford Dictionary Press, Oxford.
- Maksudoglu, Mehmet, 2023, *The Untold History of Ottoman: Menelusuri Daulah Islamiyyah Terbesar di Dunia dan Pemerintahannya*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Posner, Richard A., 1990, *The Problems of Jurisprudence*, Harvard University Press, London.
- Purba, Hasim dan Muhammad Halyan Yunhas Purba, 2019, *Dasar-dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Redaksi, Tim, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ridlwani, Zulkarnain, 2021, *Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia*, Pustaka Media, Bandar Lampung.
- Safudin, Endrik, dkk., 2022, *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, Q-Media, Yogyakarta.
- Sesung, Rusdianto, dkk., 2017, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A. De Rozarie, Surabaya.
- Setyawati, Amelia, dkk., 2023, *Teori Organisasi: Konsep dan Implementasinya*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Sinaulan, Ramlan Lina, 2021, *Teori Ilmu Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta.
- Sunyoto, Agus, 2018, *Atlas Wali Songo*, Pustaka IIMAN dan LESBUMI PBNU, Tangerang Selatan.
- Sutopo, Umarwan, 2021, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia sebagai Bagian Pengenalan Dasar Ilmu Hukum di Indonesia*, Sinergi Karya Mulia Digiprint, Ponorogo.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta.

- Syaifuddin, Muhammad, 2016, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Syamsuddin, Rahman, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Widiyastuti, Y. Sari Murti, 2020, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950.
- Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor III/MPRS/1963 Tahun 1963 Tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
- Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
- Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 1954.
- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632 Tahun 1996.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2001. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132 Tahun 2001.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956 Tahun 2009.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Tahun 2011.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 Tahun 2014.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 Tahun 2019.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 Tahun 2022.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746 Tahun 1998.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630 Tahun 2021.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2016. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1047 Tahun 2013.

Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1489 Tahun 2015.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 270 Tahun 2016.

Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Indonesia, Kode Etik Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 996/Pid.B/2020/PN Palembang tanggal 8 November 2020.

Putusan Pengadilan Nomor 198/Pid/2020/PT Palembang tanggal 17 November 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 359 K/Pid/2021 tanggal 23 Maret 2021.

C. Jurnal

Abdullah, Nawaaf dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, "*Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik*", Jurnal Akta Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 4 No. 4.

Akmal, Diya Ul, 2021, "*Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang Diharapkan*", Jurnal Hukum dan Keadilan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 8 No. 1.

Amanda, Bella Okladea, 2022, "*Prinsip Kehati-hatian Notaris di dalam Pembuatan Akta yang Sempurna*", Jurnal Recital Review Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi, Vol. 4 No. 1.

Azizah, Maulida Luthfiyatul dan Muhaimin, 2022, "*Kajian Yuridis Penandatanganan Akta yang Dilakukan Notaris di Luar Kantor Berdasarkan Alasan-alasan Tertentu*", Jurnal Notary Law Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 1 No. 4.

Dakris, Sukirman, Nur Azisa, dan Haeranah, 2022, "*Tindak Pidana Penggelapan oleh Notaris yang Melaksanakan Putusan Perdamaian terkait Adanya Pembatalan Jual Beli*", Jurnal El-Iqtishady Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 2.

Derika, Dea, 2020, "*Fungsi Notaris dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap terhadap Autentitas Akta dihubungkan dengan Asas Kehati-hatian*", Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Bandung, Vol. 18 No. 2.

- Dewi, Maya Puspita dan Aries Harianto, 2021, "*Prinsip Pembacaan Akta oleh Notaris di Hadapan Penghadap dan Saksi*", Jurnal Ilmu Kenotariatan Universitas Jember, Vol. 2 No. 1.
- Fadhilah, Nailly, 2020, "*Jejak Peradaban dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak*", Jurnal Syariah dan Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 2 No. 1.
- Firdausi, Firman, 2020, "*Quo Vadis Penentuan Kaidah Hukum bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil*", Jurnal Supremasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, Vol. 10 No. 2.
- Hably, Rio Utomo dan Gunawan Djajaputra, 2019, "*Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/OID/2015)*", Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Vol. 2 No. 2.
- Hamid, Abd. Rahman, 2021, "*Jalur Rempah dan Islamisasi Nusantara: Jaringan Samudera Pasai Abad XIII-XVI*", Jurnal Masyarakat dan Budaya UIN Raden Inten Lampung, Vol. 23 No. 3.
- Hartati, Henny dan Habib Adjie, 2018, "*Penerapan Sanksi bagi Notaris Pelaku Penggelapan Pajak Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Dps)*", Jurnal Al-Qanun, Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Universitas Narotama, Vol. 21 No. 1.
- Hidayanti, Nur Afni, 2021, "*Pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan yang Dilakukan oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/PDT/G/2016/PN.DPS)*". Jurnal Indonesia Notary Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol. 3 No. 4.
- Indradjaja, Agustijanto dan Endang Sri Hardiati, 2014, "*Awal Pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia*", Jurnal Kalpataru Majalah Arkeologi, Vol. 23 No. 1.
- Isnantiana, Nur Iftitah, 2019, "*Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara*", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 2 No. 1.

- Khalid, Muhammad, 2017, "*Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris*", Jurnal Lex Renaissance Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 1 No. 2.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa dan, I Gusti Ketut Ariawan, 2018, "*Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Notaris*", Jurnal Acta Comitatus, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Vol. 3 No. 1.
- Muljono, Bambang Eko, 2017, "*Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan*", Jurnal Independen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Vol. 5 No. 1.
- Nizar, Muh., Amiruddin, dan Lalu Sabardi, 2019, "*Ajaran Kausalitas dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pid/2016)*", Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 7 No. 1.
- Palmaya, Kiki Rizky, Wakidi, dan Yustina Sri Ekwandari, 2017, "*Kebijakan Landrent pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816*", Jurnal Pesagi FKIP Unila, Vol. 5 No. 8.
- Putra, Haldi, 2020, "*Sesuatu yang Tak Pernah Terjadi: Membayangkan Kemenangan Nusantara Melawan Kolonialisme*", Crikserta: Jurnal Pendidikan Sejarah, Magister Sejarah Universitas Andalas, Vol. 9 No. 2.
- Putri, Kerina Maulidya, Ichsan Anwary dan Diana Haiti, 2022, "*Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak Secara Bersama-sama*", Jurnal Notary Law Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 1 No. 2.
- Rahman, Fikri Ariesta, 2018, "*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap*", Jurnal Lex Renaissance, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 2 No. 2.

- Ratihtiari, Anak Agung Titah dan I Nyoman Bagiastra, 2021, *“Kualifikasi Alasan-alasan Tertentu Menurut Pasal 3 angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris”*, Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6 No. 3.
- Riyadi, Irfan, 2018, *“Kedudukan Akta Autentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara”*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 15 No. 4.
- Santoso, Hari Agus, 2021, *“Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU PTB”*, Jurnal Jatiswara Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 36 No. 3.
- Saputra, Denny dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *“Prinsip Kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik”*, Jurnal Akta Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 4 No. 3.
- Sarkowi dan Agus Susilo, 2020, *“Akar Historis Formalisasi Hukum Islam di Nusantara”*, Jurnal Sejarah Citra Lekha Departemen Pendidikan Sejarah, Sekolah Tinggi Kejuruan dan Ilmu Pendidikan—Persatuan Guru Republik Indonesia Lubuk Linggau, Vol. 5 No. 1.
- Sati, Nisrina Irbah, 2019, *“Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 49 No. 4.
- Sharfina, Vitra Hana dan Satria Sukananda, 2019, *“Perlindungan Hukum atas Hak Keperdataan bagi Orang yang Berada dalam Pengampunan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT.P/2015/PA.BTL)”*, Jurnal Hukum Justitia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 3 No. 2.
- Separen, 2020, *“Studi tentang Hukum Adat pada Zaman Hindu dan pada Zaman Islam di Nusantara”*, Jurnal Randai FKIP Universitas Riau, Vol. 1 No. 1.
- Setyawan, Yusup Hari, 2020, *“Peran Sir Thomas Stamford Raffles dalam Sistem Pajak Bumi di Pulau Jawa Tahun 1811-1816”*, Jurnal

Karmawibangga Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta, Vol. 2 No. 2.

Siregar, Rizka Azizah, Keizerina Devi Azwar dan Suprayitno, 2022, “*Analisis Yuridis Penolakan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi di Kota Medan)*”, Jurnal Doktrina Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Vol. 5 No. 1.

Supena, Cecep Cahya, 2021, “*Tinjauan Tentang Kaidah Hukum dan Kaidah-kaidah Bukan Hukum dalam Kehidupan Manusia*”, Jurnal Moderat Universitas Galuh, Vol. 7 No. 2.

Sutarni, 2018, “*Manusia, Moralitas dan Hukum*”, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 18 No. 1.

Wijaya, Daya Negeri, “*Thomas Stamford Raffles di Bengkulu: Politisi atau Ilmuwan?*”, Jurnal Paramita: Historical Studies Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang, Vol. 27 No. 1.

Wulandari, Retno dan Raden Ibnu Arly, 2022, “*Tindak Pidana Penipuan oleh Notaris (Rasio Decidendi Putusan Perkara Pidana Nomor 2200/Pid.B/2020/PN.Sby)*”, Jurnal Perspektif Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 27 No. 2.

D. Internet

Baits, Nur Ammi, “*Keluar Rumah, Wajib Izin Suami*” (online), tersedia di <https://konsultasisyariah.com> (27 Oktober 2023).

Efendi, Ahmad, “*Tujuan Kedatangan Bangsa Spanyol ke Indonesia dan Latar Belakangnya*” (online), tersedia di <https://tirto.id> (16 Oktober 2023).

Ningsih, Widya Lestari dan Nibras Nada Nailufar, “*Traktat London: Latar Belakang, Isi dan Dampaknya*” (online), tersedia di <https://www.kompas.com> (16 Oktober 2023).

Tuasikal, Muhammad Abduh, “*Kewajiban Istri*” (online), tersedia di <https://rumaysho.com> (27 Oktober 2023).

E. Sumber Lainnya

Muda, Iskandar, 2020, “*Undang-undang Jabatan Notaris beserta Perubahannya dalam Satu Naskah dan Pengujiannya di Mahkamah Konstitusi (Uji Konstitusional; Constitutional Review, Judicial Review)*”, Bahan Ajar Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.